

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan Nomor 235/PID.B/2013/PN.MKS)



Oleh

NURFATIMAH AHMAD

B 111 10 167

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN ATAU
NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI**

(Studi Kasus Putusan No 235/PID.B/2013/PN.MKS)

OLEH

NURFATIMAH AHMAD

B 111 10 167

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI
(Studi Kasus Putusan No.235/Pid. B/2013/PN.MKS)**

disusun dan diajukan oleh:

**NURFATIMAH AHMAD
B 111-10 167**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 7 Februari 2014
Dan Dinyatakan Lulus



Ketua,

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620771 1198703 1 001

Sekretaris,

Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 19202 2 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi atas mahasiswa :

Nama : NURFATIMAH AHMAD

Nim : B 111 10 167

Bagian : Hukum Pidana

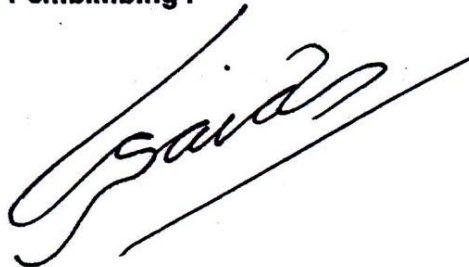
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan
Bakar Minyak (BBM)
(Studi Kasus Putusan Nomor: 235/PID.B/2013/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Januari 2014

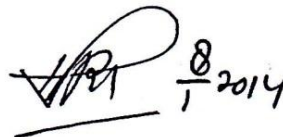
Disetujui oleh

Pembimbing I



Prof Dr. H. M. Said Karim, SH. MH
NIP. 1962077111987031001

Pembimbing II



Hj. Haeranah, SH. MH
NIP. 19661212192022002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi atas mahasiswa :

Nama : NURFATIMAH AHMAD

Nim : B 111 10 167

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)
(Studi Kasus Putusan Nomor: 235/PID.B/2013/PN.MKS)

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diajukan dalam ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir
Program Studi.

Makassar, Januari 2014

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H
NIP. 19630419 198903 1003

ABSTRAK

Nurfatimah Ahmad (B 111 10 167), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi” (Studi Kasus Putusan Nomor:235/PID.B/2013/PN.MKS)”. Di bawah bimbingan Said Karim sebagai pembimbing I dan Hj. Haeranah sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan : 235/PID.B/2013/PN.MKS.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini jaksa penuntut umum, hakim dan paniteranya dan juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian. Selain itu Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidana No.235/PID.B/2013/PN.MKS adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dan tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jeratan hukum. Selain itu, hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum

Penulis menyadari sepenuhnya selama proses penyelesaian skripsi ini sangat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat terampungkan dan mencapai tahap kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.FM.** selaku Dekan, **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 1, **Prof. Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 2, serta Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan 3, terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
2. Pembimbing 1 penulis, **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.**, serta Pembimbing 2 penulis, **Ibu Hj. Haeranah S.H., M.H.**, yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini rampung.

3. Para dosen penguji penulis, **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.** selaku Penguji 1, **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** selaku Penguji 2, Bapak **H. M. Imran Arief, S.H., M.S.** selaku Penguji 3 Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.** Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis ketika ujian sedang berlangsung dan setelah ujian selesai.
4. Penasihat Akademik Penulis, **Rastiawaty, S.H.,M.H.** dan para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan penulis ilmu yang berharga selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan. Semoga kelak ilmu yang diberikan kepada penulis menjadi amal jariyah bagi beliau semua.
5. Staff Akademik, dan staff lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama mengurus segala sesuatunya.
6. Staff di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Ibu **Nurhidayah. S. Hum**, dan Kak **Afiah Mukhtar, S. Pd**, yang telah membantu penulis selama ini terkait segala sesuatunya di Perpustakaan.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta Staf dan jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.

Doa dan dukungan moril terbesar, baik secara langsung maupun tidak langsung selama ini tentu tak bisa dielakkan berasal dari pihak keluarga, sahabat penulis, yakni:

1. Orang tuaku tercinta, Ibunda **Dra. Nuralang Arfah Wahab, S.kep** , Ayahanda **Drs. Ahmad Namrullah, MM**. Serta Kakek **H. Syahrir Wahab, MM** dan Nenek **Hj. Norma Syahrir** yang telah menjadi panutan penulis, motivator penulis dan tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Terima kasih penulis haturkan atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis selama ini. Serta teruntuk seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi penulis yang tak bisa penulis sebutkan per satu. Terima kasih banyak karena kalian semua penulis akan lebih berusaha menjadi lebih baik.
2. Kepada kakanda **Adnan Darmansyah**, Terima kasih karena telah hadir menjadi motivator dan semangat yang sangat membantu bagi Penulis.
3. Sahabat-Sahabatku **Ekayanti, Eka Febrianti, Yuni Soraya, Ayu Widita Sari, Andi Hiqmatul Af'idah, Fahma, Hazni Hasan, Izna Mulyas, Marlina jayanti, Suci Triandani, Wiwit Haryadiningrum, Nazrawati, Eka Nurinasari, Muhammad Adhi Gunawan, Andri**

Wicaksono, Abdul Havid, Arief Wijaya, Ince Rudi, Abdul Havid, Try Asyhari, Davi Radja, Irfan, Muhammad Fadryan Mallarangeng yang selama ini menemani penulis dalam suka maupun duka, dari kalian Penulis banyak belajar.

4. Teman seperjuangan di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Nunukan **Syarafina Ramlah, Noldy Pinontoan, Ariel Surya Ananta, Mulhadi, Navira, Andi Annisa Agung, Ziqra Mauliana Dewi, Muh. Ardhan Arwin, Zulkifli Muchtar** yang senantiasa menemani penulis dan tetap setia membantu Penulis.
5. Keluarga Besar **HLSC (Hasanuddin Law Study Centre), LP2KI-FHUH (Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), UKMR-UH (Unit Kegiatan Mahasiswa Renang Universitas Hasanuddin), BEM-FHUH (Badan Eksekuti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)** yang pada periode kepengurusan penulis banyak memberi ilmu dan pengetahuan serta persaudaraan kepada penulis yang penulis tidak bisa dapatkan di bangku kuliah.
6. Segenap keluarga **Legitimasi 2010** yang merupakan angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersama-sama dengan penulis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini.
7. Teman-Teman **KKN SEBATIK Gelombang 85** yang banyak membantu penulis dalam hal mendapatkan masukan-masukan

ataupun ide-ide dalam penyusunan skripsi penulis. Terima kasih karena pengalaman KKN bersama kalian takkan pernah penulis lupakan. .

Akhir kata, segala kesempurnaan adalah milik Allah SWT dan segala kekurangan adalah milik penulis sendiri. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Makassar, 01 Januari 2014

Penulis,

Nurfatimah Ahmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	6
B. Tindak Pidana	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	11
C. Bentuk Penyimpangan Distribusi	17
D. Pengangkutan.....	19

1. Pengertian Pengangkutan.....	19
2. Fungsi Pengangkutan.....	19
3. Aspek-Aspek Pengangkutan.....	20
4. Asas Hukum Pengangkutan.....	20
5. Pengangkutan Niaga.....	22
6. Pengaturan pengangkutan.....	23
E. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi	
1. Pengertian Bahan Bakar Minyak.....	24
2. Ketentuan Hukum yang mengatur Tentang Minyak dan Gas Bumi.....	26
3. Usaha Minyak dan Gas Bumi.....	27
4. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak.....	30
5. BBM Bersubsidi.....	32
F. Tindak Pidana Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi	33
G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman	
1. Pertimbangan Yuridis	37
2. Pertimbangan Sosiologis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan, Sifat, dan Tipe Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	44

D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Penerapan Hukum Pidana.....	47
1. Posisi Kasus	48
2. Dakwaan.....	49
3. Alat Bukti.....	51
- Keterangan Saksi.....	51
- Keterangan Ahli	58
- Keterangan Terdakwa.....	62
4. Barang Bukti.....	67
5. Tuntutan.....	67
6. Amar Putusan.....	69
7. Komentar Penulis.....	70
B. Pertimbangan hukum oleh Hakim	
1. Posisi Kasus.....	76
2. Pertimbangan Hakim.....	78
3. Amar Putusan.....	83
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*" dan ayat (3) "*Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*".

Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa. Oleh karena itu perusahaan dapat dikatakan

berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya. Terutama setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM terjadi penyimpangan pendistribusian BBM subsidi ke industri yang terjadi di Kota Makassar. Hal ini sering terjadi dalam usaha pendistribusian BBM di kota Makassar dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang disubsidi di SPBU 74-902-36 jl. Bawakaraeng No 120

Makassar sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter dengan menggunakan mobil tangki PT. Karya Atma Manunggal. Merupakan salah satu penyimpangan yang kerap terjadi di Kota Makassar, dimana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga dan/atau penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau tata niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi.

Dari uraian diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi khususnya di kota Makassar. Peranan Pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi di kota Makassar.

Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dalam proposal dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. (Studi Kasus Putusan Nomor 235/PID.B/2013/PN.MKS)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perkara putusan No. 235/PID.B/2013/PN.Mks ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 235/PID.B/2013/PN. Mks ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi dalam perkara putusan No. 235/PID.B/2013/PN.Mks.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 235/PID.B/2013/PN. Mks.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

- 1) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. Tindak Pidana

- Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan

sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Secara harfiah *strafbaafeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh para ahli (Lamintang, 1997: 181)

a. A. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa

“Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b. Hazewinkel Suringa, *strafbaar feit* adalah

“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam Undang-Undang.

c. Roeslan saleh, *strabaar feit* adalah

“Memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*.

Menurut Achmad Ali (2002:225), menjelaskan bahwa :

“Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat maupun hukum publik, termasuk hukum pidana.”

Moeljatno (Evi Hartanti, 2008, 2008:7) ber[pendapat sebagai berikut :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum , larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidanya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

Dari banyaknya istilah tentang *strafbaarfeit* Penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

- **Unsur-unsur tindak pidana**

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- (1) Perbuatan (Manusia)
- (2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

(3) Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Syarat materil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :
 - Niat;
 - Maksud atau tujuan;
 - Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 - Kemampuan bertanggungjawab.
2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :
 - Perbuatan;
 - Akibat;
 - Keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur objektif, terdiri atas :
 1. Perbuatan orang;
 2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
 3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.
- Unsur subjektif, terdiri atas :
 1. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
 2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden

Marpaung (2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Opzet*) dan kelapaaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa :
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif;
 - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan;
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan

oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain :

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

- **Jenis-jenis tindak pidana**

Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Jenis tindak pidana terdiri dari pelanggaran dan kejahatan.

Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa (ketidaksengajaan) dalam suatu pelanggaran
- b) Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.

- c) Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- d) Dalam pelanggaran itu terjadi ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.

Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam "*Onrecht*", yang mereka sebut "*Crimineel Onrecht*" dan "*Policie Onrecht*".

Crimineel Onrecht adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*Rechtsorde*" atau "tertib hukum" dalam arti yang lebih luas daripada sekedar "kepentingan-kepentingan", sedang "*Police Onrecht*" adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat".

Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana kita telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*.

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataanya mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap

bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan *Wetsdelicten* tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 (dua) pembagian, yang pertama kejahatan (*misdrifven*) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III.

Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian, sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena menurutnya (Teguh Prasetyo, 2010:57),

“walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana”.

Beliau lebih sepakat menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara formal dan delik yang dirumuskan secara material.

b. *Opzettelijke delicten* dan *Culpooze delicten*.

Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan.

Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk (Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu ;

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

c. *Gewone delicten* dan *Klacht delicten*

Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara. *Klacht delicten* (Teguh Prasetyo, 2010:59),

“adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena”.

Dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari yang memiliki kepentingan, siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada.

Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi dua bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten*.

1. *Absolute klachtdelicten*, adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan
2. *Relative klachtdelicten*, adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu

harus menyebutkan orang-orang yang diduga merugikan dirinya.

Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut.

Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut dihitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.

d. *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionis*

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang

seharusnya. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.

Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 2010:58), ada juga yang disebut dengan “delik *commissionis permissionem commisa*”. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain, (Teguh Prasetyo, 2010:60) diantara lain :

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) : yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di malam hari, penganiayaan berat.
- d. *Geprivilegeerd delict*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui.

- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai negeri, ayah, ibu, dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal KUHP.

C. Bentuk Penyimpangan Distribusi

Bentuk-bentuk penyimpangan distribusi BBM di kota Makassar adalah sebagai berikut:

- Mencampur solar atau premium dengan minyak tanah (mengoplos), hal ini dulunya dilakukan oleh penjual bensin eceran untuk mendapatkan keuntungan pribadi akan tetapi modus operandi ini tidak ada lagi setelah sekarang minyak tanah tidak lagi disubsidi oleh pemerintah sehingga harga minyak tanah sekarang lebih mahal bila dibandingkan dengan harga bensin eceran;
- Menjual bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin yang sah;
- Mengeluarkan sebagian minyak solar dari tangki untuk dijual (kencing supir), Tindak kriminal ini terbagi dua yaitu : yang dilakukan oleh *transportir* rekanan yang tergabung dalam HISWANA MIGAS atau yang dilakukan oleh *transportir* PT. Pertamina (Persero) itu sendiri;

- Membeli atau menampung hasil minyak solar dari tangki (kencing supir);
- Solar subsidi dijual ke industri.

Penyimpangan distribusi tersebut seringkali merugikan konsumen karena BBM yang disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini peran serta dari PT. Pertamina (Persero), BPH Migas dan aparat Kepolisian sebagai penyidik sangatlah dibutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Bagian kedua mengenai Pengawasan Pasal 41 (3) menyebutkan bahwa:

“Pengawasan atau pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur”

D. Pengangkutan

1 Pengertian pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. (Soegojatna, 1995:1)

Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan

2 Fungsi pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya di dunia perdagangan saja, tetapi berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain.

3 Aspek-aspek dalam pengangkutan

- Pelaku, yang disebut pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan, bila badan usaha atau orang pribadi/orang perorangan.
- Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam pengangkutan

- Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkut, termasuk juga hewan. Karena hewan termasuk barang
- Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.
- Fungsi pengangkutan, untuk meningkatkan nilai dari barang dan/atau penumpang.
- Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas penumpang.

4 Asas hukum pengangkutan

- Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
- Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
- Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil

dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

- Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
- Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
- Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;
- Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara indonesia untuk selalu adar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan;
- Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan

kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;

- Asas keselamatan penumpang yaitu, bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

5 Pengangkutan niaga

Istilah niaga (AbdulKadir Muhammad, 2008:4) adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga.

Pengangkutan niaga adalah penggunaan, alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ketempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha perusahaan di bidang pengangkutan dengan memungut biaya pengangkutan disebut pengangkutan niaga.

6 Pengaturan pengangkutan

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, istilah peraturan hukum (*rule of law*) dalam definisi ini meliputi semua ketentuan (Abdulkadir Muhammad, 2008;6):

1. Undang-undang pengangkutan;
2. Perjanjian pengangkutan;
3. Konvensi internasional tentang pengangkutan ; dan
4. Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat perairan, dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan.

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan.yang diterima oleh semua pihak.

E. Tinjauan Umum BBM Bersubsidi

1. Pengertian bahan bakar minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu :

“bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Pengertian minyak bumi kita ditemukan dalam pasal 3 huruf i *the petroleum (Tax Code, 1997)*

negara India. Pasal 3 huruf i berbunyi sebagai berikut :

“Petroleum” means crude oil existing in its natural condition i.e. all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from natural Gas by condensation or extraction, including distillate and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the delivery point) but excluding Natural Gas’.

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam.”

Dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, dan disuling.

Definisi gas alam dalam Pasal 3 huruf g The Petroleum Tax Code, 1997 negara India sangat luas karena dalam definisi ini dijelaskan unsur-unsur gas alam dan proses produksinya. Proses produksi itu meliputi kondensasi dan ekstrak.

Definisi yang lain dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.”

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyedapkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen (kamus besar Bahasa Indonesia, 100:205-301).

Bahan-bahan bukan Hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan pada proses pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar minyak terdiri atas :

- a) Bensin penerbangan
- b) Bensin motor
- c) Bahan bakar jet
- d) Kerosin
- e) Solar
- f) Minyak diesel dan
- g) Minyak bakar

2. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang minyak dan gas bumi

1. UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

3. Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

3. Usaha minyak dan gas bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (Pasal 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

“Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi”.

Tujuan dari kegiatan eksplorasi adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi;
2. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;
3. Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja tertentu adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia.

Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan

sarana pengangkutan, penyimpanan, serta kegiatan lain yang mendukungnya

b. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu :

“Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga”.

1. Pengolahan adalah kegiatan:

- Memurnikan;
- Memperoleh bagian-bagian;
- Mempertinggi mutu;
- Mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

2. Pengangkutan adalah kegiatan:

- Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya
- Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan;
- Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi

3. Penyimpanan adalah kegiatan:

- Penerimaan;
- Pengumpulan;
- Penampungan; dan
- Pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

4. Niaga adalah kegiatan:

- Pembelian;
- Penjualan
- Ekspor;
- Impor minyak bumi dan/atau
- Hasil olahannya; termasuk
- Niaga gas bumi melalui pipa.

Dalam Bab III Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha :

Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil olahan baik melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- Penyimpanan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau

hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

- Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, Impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga, Gas Bumi melalui pipa.

4. Izin usaha BBM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Badan Usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
- (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :
 - a. Izin usaha pengolahan;
 - b. Izin usaha pengangkutan;
 - c. Izin usaha penyimpanan, dan
 - d. Izin usaha niaga;

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha paling sedikit memuat :

- a.nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- d. syarat-syarat teknis;

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan :

1. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha:
2. pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha;
3. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu

yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi, Usaha Kecil; dan
- d. Badan Usaha Swasta.

Keempat jenis badan usaha itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir.

5. BBM Bersubsidi

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor

45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar di kawasan Asia Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh NKRI.

Harga jual eceran BBM yang disubsidi Pemerintah adalah Minyak Tanah (Rp 2.500,00), Bensin Premium (Rp 4.500,00) dan Minyak Solar (Rp 4.500,00) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 01 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dan diatur kembali dalam Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.

F. Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS),

Dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

a. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No. 22 Tahun 2001 adalah :

1) Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001

“bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00- (empat puluh miliar rupiah);

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah)".

Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf (b) UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS) terdiri atas :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan pengangkutan;
- c. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ketempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan.

Sementara untuk tindak pidana perniagaan, unsur-unsurnya (Pasal 53 huruf (d)) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perniagaan;
- c. Tanpa izin perniagaan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM. Tanpa adanya usaha perniagaan.

2) Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri atas :

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

b. Ketentuan Hukum yang mengatur peruntukkan pengguna untuk BBM solar yang disubsidi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri pada lampirannya disebutkan konsumen pengguna adalah Rumah Tangga, Usaha

Kecil/Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum.

G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lilik Mulyadi (2007: 193) mengemukakan bahwa:

”Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.”

Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal

yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. (Adami Chazawi,

2005: 73). Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.(Adami Chazawi, 2005: 97).

2. Pertimbangan sosiologis

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009: 200) bahwa dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).

Bismar Siregar (1989: 33) mengatakan bahwa, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

HB Sutopo (2002: 68) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Kepentingan umum hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap kasus yang hendak penulis teliti dan di khususkan pada Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Data dan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah
2. Didukung oleh fasilitas yang sangat memadai serta mudah dijangkau dan dapat ditunjang oleh fakta-fakta yuridis, guna memperoleh data yang akurat.

B. Pendekatan, Sifat dan Tipe Penelitian

1. Pendekatan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data, fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara

faktual tentang data mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah.

2. Tipe peneliian hukum normatif yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana dalam mengadili, serta menuntut

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan ini bersumber dari data yang relevan.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan 2(dua) jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan wawancara yang didapat dari Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder adalah data normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur-literatur buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilapangan (wawancara)

Melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Makassar dalam upaya pengumpulan data sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian sesuai pokok-pokok permasalahan.

2. Studi Kepustakaan

Menganalisa berdasarkan buku-buku literatur hukum dan Undang-Undang, yaitu : buku teknologi minyak bumi, hukum pertambangan di Indonesia, teori dan praktik pertambangan Indonesia menurut hukum, hukum pertambangan, dan pengantar metode penelitian hukum beserta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

E. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan, diteliti dan ditetapkan dari hasil penelitian, data tersebut dipilih dan dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Selanjutnya penulis menyusun hasil penelitian dalam sebuah penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahannya, selanjutnya diolah, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu penelitian yang diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang tinjauan yuridis terhadap penyimpangan distribusi bahan bakar minyak dikota Makassar.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

“Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti”. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Perkara Putusan No. 235/PID.B/2013/PN.Mks.

Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa berdasarkan kualitas kesalahannya dengan melihat latar belakang dari pada tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang di jatuhkan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan juga barang bukti yang ada. Perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain :

1. Eksplorasi dan eksploitasi tanpa adanya kontrak kerja sama (Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2001)
2. Pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan tanpa adanya izin usaha (Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001)

3. Menyalahgunakan pengangkutan dan perniagaan BBM yang di subsidi pemerintah (Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001)

Adapun proses pemidanaan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga BBM bersubsidi yang penulis teliti dengan putusan No 235/PID.B/2013/PN. MKS adalah sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

- Pada tanggal 10 April 2012 sekitar jam 11.45 WITA telah tertangkap tangan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang dimuat oleh mobil tangki merk PT. Karya Atma Manunggal pada saat menurunkan/membongkar isi tangki pemakaian kedalam jerigen kemudian ditampung untuk dijual ke pihak lain.
- Bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar adalah milik tersangka ABDUL HARIS Bin HAKKE dan milik tersangka MUCHLIS yang dibawa oleh tersangka SUDIRMAN Bin M.SUKRI dengan cara membeli Solar di SPBU 74-902 36 Jalan Gunung Bawakaraeng No.120 Makassar.
- Tersangka menurunkan/membongkar BBM jenis solar dari tangki pemakaian mobil sebanyak 300 (tiga ratus) liter kemudian ditampung, setelah BBM tersebut berjumlah 1200 (seribu dua ratus) liter barulah akan dijual ke pihak lain.

- Bahan bakar jenis solar dibeli dengan harga Rp 4.500/liter (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya dan dijual dengan harga Rp 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya.
- Sopir mobil tangki merk PT. Karya Atma Manunggal adalah tersangka SUDIRMAN Bin M SUKRI sedangkan yang melakukan penampungan dan penjualan kepihak lain adalah tersangka ABDUL HARIS Bin HAKKE dan tersangka MUCHLIS.
- Keterangan saksi ahli ABDUL MUHAEMIN Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga dan/atau penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Dakwaan

- Terdakwa I, **SUDIRMAN Bin M.SYUKRI** Terdakwa II. **ABD.HARIS Bin HAKKE**, dan Terdakwa III, MUCHLIS masing-masing dengan bekerja sama yaitu bertindak sebagai pembeli dan bertindak

sebagai penjual tanpa Surat Izin yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu terdakwa I **SUDIRMAN BIN. M SYUKRI**, mula-mula membeli solar sebanyak 2 (dua) kali dari SPBU No. 74-90236 di Jalan Gunung Bawakaraeng sebanyak 300 (tiga ratus) liter seharga Rp 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) per Liter, dan tanpa sepengetahuan pemilik mobil tangki PT. Karya Manunggal Atma Jaya DD 9600 AK adalah milik **H.M.Nasir** dan selanjutnya dijual kepada TAKDIR Alias TOMY di Jalan Maccini Pasar Malam 2 N0.7 Kelurahan Maccini Makassar.

- Terdakwa II. **ABDUL HARIS BIN HAKKE** yang bertindak sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual telah membeli BBM jenis Solar bersubsidi Pemerintah dari terdakwa I. **SUDIRMAN BIN M. SYUKRI** sebanyak 400,- (empat ratus) Liter dan dari terdakwa III. **MUCHLIS** sebanyak 1200,; (seribu dua ratus) liter yang kesemuanya dibeli oleh terdakwa I. **SUDIRMAN Bin M. SYUKRI** dan terdakwa III. **MUCHLIS** dari SPBU No. 74-90236 yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng dimana BBM jenis Solar tersebut diangkut dengan mobil Tangki PT. Karya Manunggal Atma Jaya DD 9600 AK tanpa sepengetahuan H.M.NASIR sebagai Pemilik dan selanjutnya tanpa sepengetahuan pemilik Mobil Panther **AISYA BINTI ROSI** DD 1355 JR memindahkan BBM Jenis Solar Bersubsidi sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan

mesin pompa tipe AUDP 505A yang disambung dengan selang warna biru dan selang warna masuk kedalam jeregen, dan mobil Suzuki DD 8960 AL milik **AMIR DG. MILE** tanpa sepengetahuannya pula memindahkan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter dengan menggunakan alat seperti yang disebutkan diatas, Selanjutnya akan dijual kepada siapa saja yang membutuhkan.

- Baik terdakwa I. **SUDIRMAN Bin M. SYUKRI**, terdakwa II. **ABD HARIS Bin Hakke**, dan terdakwa III. **MUCHLIS** masing-masing mengetahui bahwa BBM jenis solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dilarang diperjual belikan untuk dan atas nama pribadi/perorangan.

3. Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Bersubsidi

Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah :

1. Keterangan Saksi

1.1 **Saksi TAKDIR ALIAS TOMMY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab dimintai keterangan yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yaitu SUDIRMAN BIN M SYUKRI, ABDUL HARIS BIN HAKKE DAN MUCHLIS yakni penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 12.10 WITA di Maccini pasar malam 2 Makassar.
- Bahwa saksi mengambil BBM Jenis solar yang dibawah oleh Sudirman dan Rasbie.
- Bahwa BBM Jenis solar tersebut dipindahkan dari mobil tangki yang dibawa oleh Sudirman dan Rasbie kedalam 20 (dua puluh) jerigen yang ada di mobil panther DD 1355 JR.
- Bahwa saksi membeli BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan uang dari Abdul Haris.
- Bahwa saksi hanya sebagai pegawai dari Abdul Haris yang digaji sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa benar ketiga terdakwa tersebut yang melakukan jual beli BBM jenis solar yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa benar barang bukti berupa mesin pompa dan selang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim.

- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh ketiga terdakwa.

1.2 **Saksi ABDUL KADIR DG. SIJA** dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab dimintai keterangan yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yaitu SUDIRMAN BIN M SYUKRI, ABDUL HARIS BIN HAKKE DAN MUCHLIS yakni penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 12.10 WITA di Maccini pasar malam 2 Makassar.
- Bahwa BBM solar tersebut ditemukan di rumah saudara Muchlis sebanyak kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) liter.
- Bahwa pemilik BBM solar tersebut oleh Sudirman Bin M.Syukri. saudara Abdul Haris dan Muchlis.
- Bahwa BBM solar tersebut akan dijual kepada pihak lain.
- Bahwa sebelum BBM jenis solar tersebut dijual kepada orang lain terlebih dahulu BBM tersebut dipindahkan dari mobil Suzuki carry warna putih DD 8960 AL yang memuat beberapa buah drum.

- Bahwa sebelum pemindahan BBM tersebut selesai, tiba-tiba datanglah petugas dari Direktorat Reserse Kriminalisasi Khusus Polda SUL-SEL menggerebek orang-orang yang ada di tempat tersebut. Termasuk Sudirman Bin Sukri dan Muchlis.
- Bahwa benar ketiga terdakwa tersebut yang melakukan jual beli BBM jenis solar yang bersubsidi Pemerintah.
- Bahwa benar barang bukti berupa mesin pompa dan selang yang diperlihatkan oleh majelis Hakim.
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh ketiga terdakwa.

1.3 **Saksi RASBIE BIN RAHMAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab dimintai keterangan yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yaitu SUDIRMAN BIN M SYUKRI, ABDUL HARIS BIN HAKKE DAN MUCHLIS yakni penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 12.10 WITA di Maccini pasar malam 2 Makassar.

- Bahwa saksi adalah sopir mobil panther yang mengangkut BBM solar ke rumah Muchlis.
- Bahwa BBM solar tersebut diambil dari mobil tangki DD 9600 AK milik H. Muhammad Nasir.
- Bahwa yang memindahkan BBM solar tersebut dari mobil tangki ke Mobil Panther yang memuat jerigen adalah Sudirman dan Takdir atas suruhan Abd.Haris.
- Bahwa jumlah solar di pindahkan dari mobil tangki ke mobil phanter adalah sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen, dimana tiap jerigen berisi 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa setelah jerigen terisi penuh saksi membawa BBM solar tersebut kerumah Muchlis.
- Bahwa setelah BBM solar tersebut sampai di rumah muchlis lalu dipindahkan lagi kedalam mobil Suzuki Carry warna putih DD 8960 AL.
- Bahwa sebelum BBM jenis solar tersebut selesai dipindahkan maka datanglah anggota Direktorat Kriminal Khusus Polda SUL-SEL menggerebek tempat itu.
- Bahwa pada saat BBM solar tersebut diturunkan dari mobil tangki PT. Karya Manunggal DD 9600 AK ke mobil panther DD 1355 JR yang ada di tempat itu adalah Sudirman Takdir, Abd. Haris.

- Bahwa benar barang bukti berupa mesin pompa yang diperlihatkan oleh majelis Hakim.
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh ketiga terdakwa.

1.4 **Saksi DASMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab dimintai keterangan yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yaitu SUDIRMAN BIN M SYUKRI, ABDUL HARIS BIN HAKKE DAN MUCHLIS yakni penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 12.10 WITA di Maccini pasar malam 2 Makassar.
- Bahwa saksi memsng pernah bertugas di SPBU nomor 74-902-36 Jalan. Gunung Bawakaraeng no. 120 Makassar.
- Bahwa saksi pernah melayani mobil tangki untuk mengisi solar di tempat saya bertugas namun saya tidak ingat lagi berapa liter banyaknya.

- Bahwa yang bertugas pada saat penggerebekan tersebut adalah saya sendiri pada pompa 5 (lima).
- Saksi menjelaskan bahwa pompa 4 (empat) dan 5 (lima) pada SPBU 74-902-36 Jalan. Gunung Bawakaraeng No. 120 Makassar melayani BBM jenis solar bersubsidi pemerintah.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pastinya namun seingat saksi jumlahnya ratusan liter dan mobil tangki tersebut mengisi BBM jenis solar lebih dari 1 (satu) kali dengan jam yang berbeda.

1.5 **Saksi SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab dimintai keterangan yaitu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga terdakwa yaitu SUDIRMAN BIN M SYUKRI, ABDUL HARIS BIN HAKKE DAN MUCHLIS yakni penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 12.10 WITA di Maccini pasar malam 2 Makassar.
- Bahwa saksi adalah petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda SUL-SEL.

- Bahwa saksi yang melakukan penggerebekan/penampakan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau Niaga BBM Solar bersubsidi tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan 3 (tiga) buah mobil sebagai barang bukti yaitu mobil tangki DD 9600 AK, mobil panther DD 1355 JR dan mobil Suzuki carry pick up DD 8960 AL.
- Bahwa benar ketiga terdakwa tersebut yang melakukan jual beli BBM jenis solar yang bersubsidi Pemerintah.
- Bahwa benar barang bukti berupa mesin pompa dan selang yang diperlihatkan oleh majelis Hakim.
- Bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh ketiga terdakwa.

2. Keterangan Ahli

AHLI MUHAEMIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai pengetahuan dan keahlian yang saksi miliki.
- Sebagaimana lazimnya sebelum memberikan keterangan saksi mengangkat sumpah sesuai Agama Islam, dihadapan Penyidik.

- Dalam pemeriksaan saat ini, saksi dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas, an. Kepala BPH Migas, No : 876/7/SPBU/BPH/2012, tanggal 10 Juli 2012.
- Bahwa memberikan keterangan ahli kepada Penyidik POLRI telah menjadi tugas rutin, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BPH Migas dengan POLRI terakhir, yaitu: Nomor 03/KB/Ka/BPH MIGAS/V/2011 dan Nomor: B/11/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.
- Keahlian berdasarkan pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar Negeri:
 - a. Riwayat Pendidikan Formal :
 - FE-UNHAS Makassar, lulus Tahun 1985.
 - Scula Enrico Mattei Milan Italia, Tahun 1990-1991
 - b. Riwayat Pekerjaan/Jabatan :
 - Tahun 1987 s/d 2005 sebagai Auditor di Kementerian ESDM
 - TMT 01 Juni 2005 s/d sekarang sebagai Anggota Kelompok Kerja Wilayah I Direktorat BBM BPH Migas di Jakarta
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Direktorat BBM – BPH Migas sebagai Anggota Kelompok Kerja Wilayah I dengan tupoksi

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian BBM dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI.

- Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada Bab I Pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan BBM yang disubsidi Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu.
- Dalam Bab III Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha :

Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil

olahan baik melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- Penyimpanan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, Impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga, Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab tanggung renteng, keluar dari instalasi sampai dengan SPBU tujuan sepenuhnya adalah tanggung jawab pengemudi atas nama transportir. Transportir untuk wilayah sulawesi selatan adalah PT. ELNUSA.
- Dokumen yang menyertai pengangkutan BBM bersubsidi dan Instalasi Pengisian sampai ke SPBU adalah Surat Perintah Pengiriman (SPP) atau nama lain.
- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga dan atau penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan

cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa apabila kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan badan usaha atau perorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
- Secara khusus ketentuan pidananya memang hanya tercantum dalam UU No 22 tahun 2001 tentang Migas.
- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan atau niaga dan atau penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 dan/atau Pasal 23 Subs Pasal 53 huruf (b), (c), dan (d) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- **Setiap orang**, dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia wajib tunduk dan taat kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga, seperti PT. PERTAMINA (PERSERO) atau Badan Usaha lain yang ditunjuk sebagai penyedia jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah), akan tetapi termasuk juga orang-orang yang tidak terkait kontrak kerja sama.

3. Keterangan Terdakwa

3.1 **TERDAKWA SUDIRMAN M. SYUKRI** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebab ditangkap oleh petugas Polri Karena diketahui memperjual belikan BBM bersubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Polda SUL-SEL pada hari Selasa tanggal 10 april 2012 di Jl. Maccini pasar Malam 2 No. 14 Makassar.

- Bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasehat Hukum dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa selaku sopir mobil tangki PT. Karya Atma Manunggal milik M. Nasir mengambil solar pada SPBU 74-902-36 Jl. Gunung Bawakaraeng no. 120 Makassar.
- Bahwa BBM tersebut saya jual terlebih dahulu dipindahkan dari mobil tangki ke mobil panther yang telah menyiapkan jerigen.
- Bahwa pemindahan BBM tersebut diangkut dengan menggunakan mesin pompa dan selang 2 (dua) inci.
- Bahwa pengangkutan dan pembongkaran BBM tersebut tidak diketahui oleh pemilik mobil tangki DD 9600 AK.
- Bahwa pengangkutan dan pembongkaran BBM tersebut dilakukan tanpa surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui ia telah melanggar peraturan yang melarang memperjual belikan BBM jenis solar yang bersubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

3.2. **TERDAKWA ABDUL HARIS BIN HAKKE** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebab ditangkap oleh petugas Polri Karena diketahui memperjual belikan BBM bersubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasehat Hukum dalam perkara ini.
- Bahwa benar terdakwa pernah memperjual belikan secara tidak sah BBM jenis solar bersubsidi pemerintah.
- Bahwa BBM yang ditemukan oleh anggota Dit. Krimsus Polda adalah milik saya yang saya beli dari Sudirman Bin M. Syukri sebanyak 400 (empat ratus) Liter dan dari saudara Muchlis sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) Liter.
- Bahwa benar BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibeli dari SPBU 74-902-36. Jl. Gunung Bawakaraeng No. 20 Makassar dengan menggunakan mobil tangki DD 9600 AK. Milik M. Nasir.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang didalam melakukan kegiatan jual beli BBM jenis solar yang bersubsidi tersebut.
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut terjual pada orang lain petugas Dit. Krimsus Polda SUL-SEL terlebih dahulu menggerebek kegiatan tersebut.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah mobil tangki DD 9600 AK, 1 (satu) buah mobil panther DD 1355 JR dan 1 (satu) buah mobil Suzuki carry Pick up DD 8960 AL dan BBM jenis solar sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter serta 1 (satu) buah mesin pompa dan selang warna biru ukuran 2 (dua) inci.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

3.3 **TERDAKWA MUCHLIS** di depan persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebab ditangkap oleh petugas Polri Karena diketahui memperjual belikan BBM bersubsidi pemerintah secara tidak sah.
- Bahwa terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasihat Hukum dalam perkara ini.
- Bahwa benar terdakwa terdakwa pernah memperjual belikan secara tidak sah BBM jenis solar bersubsidi pemerintah.

- Bahwa terdakwa dengan Abdul Haris Bin Hakke dan Sudirman Bin M. Syukri mempunyai hubungan kerjasama yaitu bersama-sama membeli dan menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi pemerintah.
- Bahwa penangkapan oleh Dit. Krimsus Polda SUL-SEL terjadi pada hari selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 11.30 WITA di Jl. Maccini Pasar Malam 2 Makassar.
- Bahwa jumlah BBM jenis solar bersubsidi yang ditemukan oleh petugas Polri di Jl. Maccini Pasar Malam 2 sebanyak 1600 (seribu enam ratus) Liter dengan rincian 600 (enam ratus liter) Liter dibawa oleh mobil Panther DD 1355 JR dan 1000 (seribu) Liter diatas mobil Suzuki carry DD 8960 AL.
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita oleh petugas Polri adalah 1 (satu) buah mobil tangki DD 9600 AK, 1 (satu) buah mobil Phanter DD 1355 JR dan 1 (satu) buah mobil Suzuki carry pick up DD 8960 AL, dan BBM jenis solar sebanyak 1600 (seribu enam ratus) Liter serta 1 (satu) buah mesin pompa dan selang warna biru ukuran 2 (dua) inci.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

4. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa mesin pompa air Type AUDP505 A, selang 2 (dua) inci warna biru dan warna putih yang masing-masing panjangnya 5 (lima) meter. Kemudian diperlihatkan 3 (tiga) foto unit mobil yaitu mobil tangki PT. Karya Atma Manunggal DD 9600 AK, mobil panther warna silver DD 1355 JR dan mobil Suzuki carry pick up warna putih DD 8960 AL yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar yang bersubsidi pemerintah tanpa setahu pemilik kendaraan tersebut. Uang sebanyak Rp 8.019.000,00- (pengganti BBM 1600 Liter), 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,00- adalah benar merupakan barang bukti dalam perkara tersebut.

5. Tuntutan

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu :

- Menyatakan terdakwa Sudirman Bin M. Sukri, Abdul Haris Bin Hakke dan Muchlis ketiganya terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan saling membantu tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan, pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah sebagai

mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa Sudirman Bin M. Sukri, Abdul Haris Bin Hakke dan Muchlis dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), Subsida 1 (satu) bulan penjara. Barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil masing-masing mobil tangki DD 9600 AK, mobil panther DD 1355 JR dan mobil Suzuki carry pic up DD 8960 AL dikembalikan kepada yang berhak.
- Barang bukti berupa uang hasil lelang BBM 1600 Liter sebesar Rp 8.019.000,- (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) dan tiga lembar uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah mesin pompa type AUDP505A dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah selang warna biru panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah selang warna putih panjang 5 (lima) meter dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa I. SUDIRMAN Bin M. SYUKRI, Terdakwa II. ABD HARIS Bin HAKKE dan Terdakwa III. MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DAN SALING MEMBANTU TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR YANG BERSUBSIDI PEMERINTAH”
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mobil masing-masing mobil tangki DD 9600 AK, mobil Panther DD 1355 JR dan mobil Suzuki Carry Pick Up DD 8960 AL, **dikembalikan kepada yang berhak, ;**

- uang hasil lelang BBM 1600 (seribu enam ratus) Liter sebesar Rp 8.019.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa type AUDP505A, **dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah selang warna biru panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah selang warna putih panjang 5 (lima) meter **dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2013

7. Komentar Penulis

Berdasarkan analisa yuridis tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka yaitu Sdr. ABDUL HARIS Bin HAKKE berteman, melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Gas Bumi dengan oleh karena terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu:

Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).”

a. Setiap Orang

Dalam hal permasalahan ini unsur Setiap orang adalah subyek hukum yang ditujukan kepada orang secara pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Fakta yang dapat diungkap dan unsur pasal setiap orang adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi :

- 1) Saksi TAKDIR Alias TOMI menjelaskan bahwa tersangka Sopir mobil tangki merk PT.Karya Atma Manunggal Sdr. SUDIRMAN Bin M SUKRI telah memperoleh BBM bersubsidi jenis solar di SPBU 74-902 36 jalan Gunung Bawakaraeng No.120 Makassar dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter.
- 2) Saksi ABD KADIR DG.SIJA menjelaskan bahwa pemilik BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) drom isi 1200 (seribu dua ratus) liter tersebut adalah Sdr. MUCHLIS sebanyak 1000 (seribu) liter dan Sdr. ABD. HARIS sebanyak 200 (dua ratus) liter. 1200 (seribu dua ratus) liter yang akan dijual ke pihak lain.
- 3) Saksi DASMAWATI (Karyawan SPBU) 74-902 36 Gunung Bawakaraeng) menjelaskan bahwa pada tanggal 10 april 2012 memang pernah ada kendaraan pengangkut BBM yang mengisi

BBM jenis solar pada tangki pemakaian, namun untuk spesifikasi kendaraan truk pengangkut BBM tersebut saksi tidak ingat (saksi sudah lupa merek dan nomor polisi), saksi lupa berapa liter kendaraan tersebut mengisi BBM jenis solar pada tangki pemakaiannya dan kendaraan tersebut mengisi BBM lebih dari 1 (satu) kali pada hari yang sama pada jam yang berbeda.

- 4) Saksi ahli Sdr. ABDUL MUHAEMIN menerangkan bahwa setiap orang, sebagaimana di maksud dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat diartikan, bahwa setiap warga negara indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di wilayah hukum indonesia wajib tunduk dan taat kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga, seperti PT PERTAMINA (PERSERO) atau Badan Usaha lain yang ditunjukkan sebagai penyedia jenis BBM tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah), akan tetapi termasuk juga orang-orang yang tidak terkait kontrak kerja sama.

2. Keterangan tersangka :

- 1) Bahwa tersangka SUDIRMAN bin M SUKRI merupakan sopir mobil tangki solar Industri merk PT. Karya Atma Manunggal dengan nomor polisi DD 9600 AK yang mengambil atau

menurunkan sebagian isi tangki pemakaian untuk kemudian dijual kembali

- 2) Bahwa tersangka ABDUL HARIS Bin HAKKE telah membeli BBM jenis Solar dari tersangka SUDIRMAN Bin M SUKRI sebanyak 600 (enam ratus) liter untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliter.
- 3) Bahwa tersangka MUCHLIS membeli BBM jenis solar tersebut dari tersangka SUDIRMAN bin M SUKRI sebanyak 1000 (seribu) liter untuk dijual kembali dengan harga Rp 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus ribu rupiah) perliter.

Unsur ini sesuai dengan klausul Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa tanggung jawab pidana dikenakan kepada orang secara pribadi. Dalam hal ini adalah tersangka SUDIRMAN Bin M SUKRI sebagai penyedia barang, tersangka ABD HARIS Bin HAKKE dan tersangka MUCHLIS sebagai pembeli untuk dijual kembali.

b. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti :

- Keterangan Saksi-saksi :

- 1) Saksi SUNARDI menjelaskan bahwa kendaraan pengangkut BBM Solar Industri yang dibawa oleh tersangka SUDIRMAN Bin M SUKRI ditemukan telah menurunkan/membongkar isi tangki pemakaian sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter kemudian dinaikkan ke mobil Isuzu Panther warna putih DD 1355 JR. **(Jumlah keseluruhan BBM diatas mobil Isuzu Panther sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, dimana isi tiap jerigen sebanyak 20 (dua puluh) liter dan total keseluruhan dari jumlah BBM yaitu 400 (empat ratus) liter)** dan dibawa ke rumah milik Sdr. MUCHLIS untuk ditampung.
- 2) Saksi ABD KADIR DG. SIJA, menjelaskan bahwa jumlah BBM Jenis Solar yang ditemukan oleh petugas Polri di rumah milik Sdr. MUCHLIS Jl. Urip Sumoharjo Ir. Maccini Makassar sebesar 6 (enam) drom dengan isi 1200 liter diatas mobil SUZUKI CARRY warna putih DD 8960 AL.
- 3) Saksi ahli Sdr. ABDUL MUHAEMIN, menerangkan bahwa Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga dan atau penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan dapat

dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Keterangan tersangka :

1. Tersangka SUDIRMAN Bin M SUKRI, menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012, tersangka SUDIRMAN bin M SUKRI telah mengeluarkan/membongkar isi tangki pemakaian mobil BBM tersebut dengan cara menyedotnya menggunakan selang 2 (dua) inci dan menampungnya menggunakan jerigen yang berisi 25 (dua puluh lima) liter solar sebanyak 6 (enam) jerigen.
2. Tersangka ABDUL HARIS Bin HAKKE, menerangkan bahwa Bahan bakar jenis solar milik tersangka dan milik tersangka Sdr. MUCHLIS sebanyak 1600 (seribu enam ratus) liter jenis solar diperoleh dari tersangka Sdr. SUDIRMAN yang dibeli dari SPBU 74-902-36 Jalan Gunung bawakaraeng No. 20 Makassar dengan harga Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus) perliter dan tersangka membelinya dari tersangka Sdr. SUDIRMAN dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perliter

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 235/PID.B/2013/PN. Mks

Dalam skripsi ini penulis mengambil putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar dalam mengkaji lebih dalam mengenai penjatuhan pidana, yang tentunya tidak lepas dari beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

1. Posisi Kasus

- Pada tanggal 10 April 2012 sekitar jam 11.45 WITA telah tertangkap tangan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang dimuat oleh mobil tangkimerk PT. Karya Atma Manunggal pada saat menurunkan/membongkar isi tangki pemakaian kedalam jerigen kemudian ditampung untuk dijual ke pihak lain.
- Bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar adalah milik tersangka ABDUL HARIS Bin HAKKE dan milik Tersangka MUCHLIS yang dibawa oleh tersangka SUDIRMAN Bin M.SUKRI dengan cara

membeli Solar di SPBU 74-902 36 Jalan Gunung Bawakaraeng No.120 Makassar.

- Tersangka menurunkan/membongkar BBM jenis solar dari tangki pemakaian mobil sebanyak 300 (tiga ratus) liter kemudian ditampung, setelah BBM tersebut berjumlah 1200 (seribu dua ratus) liter barulah akan dijual ke pihak lain.
- Bahan bakar jenis solar dibeli dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya dan dijual dengan harga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa sopir mobil tangki merk PT. Karya Atma Manunggal adalah tersangka SUDIRMAN Bin M SUKRI sedangkan yang melakukan penampungan dan penjualan kepihak lain adalah tersangka ABDUL HARIS Bin HAKKE dan tersangka MUCHLIS.
- Keterangan saksi ahli ABDUL MUHAEMIN penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga dan atau penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Pertimbangan Hakim

1. Menyatakan terdakwa I. SUDIRMAN Bin M. SYUKRI, Terdakwa II. ABD HARIS Bin HAKKE dan Terdakwa III. MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DAN SALING MEMBANTU TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR YANG BERSUBSIDI PEMERINTAH”
2. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mobil masing-masing mobil tangki DD 9600 AK, mobil Panther DD 1355 JR dan mobil Suzuki Carry Pick Up DD 8960 AL, **dikembalikan kepada yang berhak**, ;
 - uang hasil lelang BBM 1600 Liter sebesar Rp. 8.019.000,- (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000 dan 1 (satu) buah mesin pompa type AUDP505A, **dirampas untuk Negara** ;

- 1 (satu) buah selang warna biru panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah selang warna putih panjang 5 (lima) meter **dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Para terdakwa agar Para terdakwa mendapatkan hukuman yang sering-seringannya dengan alasan :

- Para terdakwa menyesaii perbuatan serta tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa punya tanggungan keluarga ;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang ada pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya :

Menimbang., bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 07 Februari 2013 yang berbunyi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yaitu saksi 1. TAKDIR alias TOMMY, 2. ABDUL KADIR DG. SIJA 3. RASBIE Bin RAHMAN 4. DASMAWATI dan 5. SUNARDI sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) unit mobil masing-masing mobil tangki DD 9600 AK, mobil Panther DD 1355 JR dan mobil Suzuki Carry Pick Up DD 8960 AL, Uang hasil lelang BBM 1.600 (seribu enam ratus) liter sebesar Rp. 8.019.000 (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa type AUDP505A, 1 (satu) buah selang warna biru panjang 5 (lima) meter dan 1(satu) buah selang warna putih panjang 5 (lima) meter ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan ;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah, maka pembelaan terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pengecualian pidana pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik yang bersifat alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara terdakwa ditahan sementara dan penahanan itu dilakukan secara sah, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan terdakwa dari tahanan karena itu di perintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 3 (tiga) unit mobil masing-masing mobil tangki DD 9600 AK, mobil Panther DD 1355 JR dan mobil Suzuki Carry Pick Up DD 8960 AL, Uang hasil lelang BBM 1.600 (seribu enam ratus) liter sebesar Rp. 8.019.000,- (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa type AUDP505A, 1 (satu) buah selang warna biru panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah selang warna putih panjang 5 (lima) meter ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya subsidi BBM sehingga dapat merugikan masyarakat golongan bawah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan, mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

3. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa I. SUDIRMAN Bin M. SYUKRI, Terdakwa II. ABD HARIS Bin HAKKE dan Terdakwa III. MUCHLIS telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
 “SECARA BERSAMA-SAMA DAN SALING MEMBANTU TANPA HAK
 DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN
 PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR YANG
 BERSUBSIDI PEMERINTAH”

2. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mobil masing-masing mobil tangki DD 9600 AK, mobil Panther DD 1355 JR dan mobil Suzuki Carry Pick Up DD 8960 AL, **dikembalikan kepada yang berhak, ;**
 - uang hasil lelang BBM 1600 (seribu enam ratus) liter sebesar Rp 8.019.000,- (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa type AUDP505A, **dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah selang warna biru panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah selang warna putih panjang 5 (lima) meter **dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2013

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit mobil masing-masing mobil tangki DD 9600 AK, mobil Panther DD 1355 JR dan mobil Suzuki Carry Pick Up DD 8960 AL, **dikembalikan kepada yang berhak ;**
- uang hasil lelang BBM 1600 (seribu enam ratus) Liter sebesar Rp 8.019.000,- (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa type AUDP505A, **dirampas untuk Negara ;**
- 1 (satu) buah selang warna biru panjang 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah selang warna putih panjang 5 (lima) meter **dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

5.000,- (lima ribu rupiah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan No. 235/PID.B/2013/PN.MKS), dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kasus tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada barang bukti, keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, yaitu Sdr. SUDIRMAN, Sdr. ABDUL HARIS Bin HAKKE, dan Sdr. MUCHLIS telah terbukti melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidana No.235/PID.B/2013/PN.MKS adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan yang dijatuhkan telah memenuhi ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dan tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jeratan hukum. Selain itu, hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

1. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi di kota Makassar.

2. Hendaknya dalam pelaksanaan pengawasan distribusi BBM oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak dari depo Pertamina ke pangkalan dan masyarakat ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku penyimpangan terhadap distribusi bahan bakar minyak.
3. Hendaknya dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyimpangan distribusi bahan bakar minyak,

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. ***Menguak Tabir Hukum, Edisi kedua***. PT Toko Gunung Agung tbk : Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin Farid, 2010, ***Hukum Pidana 1***. Sinar Grafika : Jakarta
- Bambang Poernomo. 1982. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Ghalia Indonesia : Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 2005. ***Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana***. Sinar Grafika : Jakarta.
- Moeljatno,L. 2002. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Rineka Cipta : Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. ***Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia***. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Purwosutjipto.2003. ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan***. Djambatan : Jakarta.
- Ruba'I Mascruchin. 2001. ***Asas-Asas Hukum Pidana***. UM PRESS : Malang
- Salim HS. 2010. ***Hukum Pertambangan Indonesia***. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Soegijatno Tjakranegara. 1995. ***Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang***. Rineka Cipta : Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal***. Politea : Bogor.
- Sudarto. 1990. ***Hukum Pidana I***. Yayasan Sudarto : Semarang.

..... **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

Y.Sri Susilo. 2013. **Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia.** Pustaka Baru : Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1980. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.** Refika Aditama : Bandung.